

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada hasil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan salah satu landasan pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, diperlukan tambahan dana dari masyarakat karena keterbatasan sumber daya yang ada.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adanya BLU menjadikan pemerintah lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya, sehingga memungkinkan pemerintah untuk berbisnis dan berwirausaha namun tetap mengedepankan pelayanan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai BLU juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layann Umum yang memberikan arahan bahwa pola BLU diberikan kepada satuan kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi) untuk membedakan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Saat ini jumlah Satuan Kerja di Indonesia yang ditetapkan sebagai BLU ada sebanyak

157 BLU. Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan lembaga satuan pendidikan. Kebijakan BLU pada lembaga pendidikan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan di era globalisasi sekarang ini. Persaingan tidak hanya terjadi di lingkungan lembaga swasta, namun juga pemerintahan. Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia mengalami banyak perubahan dan tantangan. Revolusi digital, tingginya tuntutan akuntabilitas dan keharusan untuk melakukan pengendalian biaya serta mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas secara bersamaan merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh institusi perguruan tinggi (Ismail, 2010).

Adanya kebijakan BLU pada lembaga pendidikan juga salah satu upaya dalam rangka meningkatkan proses manajemen yang berbasis pada pelayanan dan kualitas kerja serta pengembangan keilmuan yang dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan kebijakan diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KMK.05/2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang (IAIN Imam Bonjol Padang) menjadi salah satu instansi pemerintah yang mendapatkan mandat untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia, IAIN Imam Bonjol Padang kedepan dikelola berdasarkan pada tiga orientasi dasar yakni kualitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Tuntutan tersebut menjadi semakin meningkat lagi setelah IAIN Imam Bonjol Padang beralih status menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yaitu Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN Imam Bonjol Padang). Peralihan status ini diresmikan pada tahun 2017 berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang. Kedua perubahan besar tersebut akan membawa banyak perubahan-perubahan di berbagai aspek dalam lingkungan satuan kerja BLU UIN Imam Bonjol Padang.

Tuntutan penyelenggaraan PK-BLU pada suatu satuan kerja bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, tidak lain halnya pada perguruan tinggi yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Proses pendidikan dan pembelajaran dapat menggambarkan kualitas dan mutu layanan pendidikan. Peningkatan kualitas

proses dan mutu pelayanan yang diselenggarakan UIN Imam Bonjol Padang dalam konteks proses pendidikan dan pengembangannya juga mengacu pada indikator keberhasilan dan pencapaian administrasi dan keuangan serta kepuasan *stakeholders*, terutama memiliki organisasi dan manajemen internal yang sehat. Banyak indikator untuk melihat kesehatan organisasi, salah satunya adalah faktor kinerja keuangan. Jika semuanya sudah terselenggara dengan baik, maka dapat dikatakan penyelenggaraan pendidikan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) telah memenuhi syarat substantif, teknis, dan administratif sebagaimana telah disyaratkan dalam PP No. 23 tahun 2005 tentang PK-BLU.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan dan isu serta fenomena di atas, UIN Imam Bonjol Padang diwajibkan untuk mengajukan usulan tarif layanan jasa pendidikan dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh UIN Imam Bonjol Padang dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan sudah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Salah satu nomenklatur menyebutkan bahwa layanan tarif harus mempertimbangkan atau menganalisis empat faktor yaitu : (1) faktor kontinuitas dan pengembangan layanan; (2) faktor daya beli masyarakat; (3) faktor rasa keadilan dan kepatutan; dan (4) kompetisi yang sehat.

Sejalan dengan tuntutan responsif di atas UIN Imam Bonjol Padang berusaha untuk meningkatkan proses manajemen yang berbasis pada pelayanan dan kualitas kinerja serta atas pertimbangan kebutuhan peningkatan responsifitas dan peluang yang dimungkinkan. Maka, tim UIN Imam Bonjol Padang telah menyusun usulan tarif layanan untuk mendapatkan persetujuan ketetapan menteri keuangan.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan tim penyusun tarif, saat ini UIN Imam Bonjol Padang menggunakan tarif pelayanan akademik yang diperhitungkan dengan metode *unit cost*. Perhitungan tersebut dilakukan dengan merujuk kepada realisasi anggaran tahun 2014. Agar UIN Imam Bonjol Padang dapat meningkatkan eksistensinya dalam dunia pendidikan Indonesia, UIN Imam Bonjol Padang harus bisa lebih baik mengelola keuangannya dari tahun ke tahun dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk peningkatan pendapatan BLU, sekaligus mengatasi kendala-kendala yang ada.

Dalam beberapa tahun UIN Imam Bonjol Padang cukup mampu menjaga kestabilan penerimaannya dengan tetap mempertimbangkan faktor kontinuitas dan pengembangan layanan dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan target dan realisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan negara bukanpajak (PNBP) di UIN Imam Bonjol Padang dan tabel 2 menunjukkan proyeksi atau estimasi penerimaan PNBP tiga tahun kedepan.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan PNBP Keuangan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2010	12,918,054,000	12,036,583,297	93.18%
2	2011	16,328,420,000	14,077,707,730	86.22%
3	2012	16,788,321,000	15,383,384,878	91.63%
4	2013	20,298,812,000	17,437,072,697	85.90%
5	2014	24,131,671,000	17,822,413,340	73.98%
6	2015	21,809,501,000	20,073,594,685	92.04%

Sumber : Bagian Keuangan UIN Imam Bonjol Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pendapatan PNBP keuangan UIN Imam Bonjol Padang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena peminat/calon mahasiswa yang selalu meningkat. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, karena IAIN Imam Bonjol Padang berkonversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2015.

Tabel 2 menunjukkan proyeksi penerimaan PNBP-BLU UIN Imam Bonjol Padang untuk empat tahun ke depan terhitung mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Proyeksi ini didasarkan pada proyeksi jumlah calon mahasiswa dan mahasiswa dikaitkan dengan tarif layanan. Selain itu juga ditambah penerimaan kerjasama dengan pihak lain.

Tabel 2. Proyeksi Penerimaan PNBP Keuangan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Preyeksi Penerimaan	Persentase Kenaikan
1	2016	34.294.239.900	17,90%
2	2017	39.222.062.400	14,30%
3	2018	46.536.860.150	18,60%
4	2019	54.027.714.288	16,10%

Sumber : Bagian Keuangan UIN Imam Bonjol Padang

Berdasarkan tabel 2 di atas, proyeksi penerimaan PNBP-BLU dari tahun 2016 sampai tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 17,9%. Kenaikan itu didasarkan dari proyeksi jumlah calon mahasiswa yang mendaftar untuk ikut seleksi ujian masuk dan jumlah mahasiswa yang diterima. Asumsi kenaikan jumlah mahasiswa didasarkan pada perkembangan di masa depan terutama ketika terjadi konversi UIN Imam Bonjol Padang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ketika UIN Imam Bonjol Padang telah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), maka akan membuka program studi baru baik di bawah fakultas yang baru maupun di fakultas yang sudah ada dan dari optimalisasi unit bisnis yang dikembangkan selama ini.

Kenaikan potensi pendapatan seperti terlihat pada table 2, dibuat berdasarkan pada peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dari tahun ke tahun. Sedangkan peningkatan calon mahasiswa yang mendaftar, bisa disebabkan karena : 1) posisi UIN Imam Bonjol Padang yang strategis di Ibukota Provinsi, sehingga dapat dengan mudah di akses; 2) bertambah banyaknya pilihan program studi yang ditawarkan oleh UIN Imam Bonjol Padang; dan 3) biaya pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang yang sangat terjangkau.

Menurut penulis, dengan biaya pendidikan yang relatif terjangkau ini, maka sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan jasa pendidikan UIN Imam Bonjol sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan putra putri mereka. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftar seleksi ujian masuk.

Tabel 3. Data Jumlah dan Biaya Pendaftar Seleksi Ujian Masuk Program Sarjana (S.1) Tahun Akademik 2010-2015

No.	Tahun Akademik	Biaya			Trend (%)
		Peserta	@	Total	
1	2010/2011	1901	150.000	285.150.000	-
2	2011/2012	2681	150.000	402.150.000	41%
3	2012/2013	3216	150.000	482.400.000	20%
4	2013/2014	3855	150.000	578.250.000	20%
5	2014/2015	9700	150.000	1.455.000.000	152%
6	2015/2016	10413	150.000	1.561.950.000	73%

Sumber : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang

Tabel 3 di atas menunjukkan animo masyarakat untuk menggunakan layanan jasa pendidikan UIN Imam Bonjol Padang yang terus meningkat. Peningkatan yang signifikan terlihat untuk tahun akademik 2014/2015, yaitu sebesar 152% dibanding tahun akademik sebelumnya. Sedangkan tabel 4 menunjukkan data pendaftar seleksi ujian masuk program magister S.2 pada program pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang lima tahun terakhir.

Tabel 4. Data Jumlah dan Biaya Pendaftar Seleksi Ujian Masuk Program Magister (S.2) Tahun Akademik 2010-2015

No.	Tahun Akademik	Biaya			Trend (%)
		Peserta	@	Total	
1	2010/2011	177	300.000	53.100.000	-
2	2011/2012	252	300.000	75.600.000	42%
3	2012/2013	339	300.000	101.700.000	35%
4	2013/2014	207	250.000	51.750.000	-39%
5	2014/2015	274	250.000	68.500.000	32%
6	2015/2016	242	250.000	60.500.000	-12%

Sumber : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang

Berdasarkan tabel 4 menyatakan bahwa *trend* jumlah calon mahasiswa mendaftar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2010/2011 sampai



tahun 2012/2013 mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2013/2014 terjadi penurunan, namun tahun berikutnya terus mengalami kenaikan.

Tabel 5 berikut menunjukkan data pendaftar seleksi ujian masuk program doktor S.3 pada program pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang lima tahun terakhir.

Tabel 5. Data Jumlah dan Biaya Pendaftar Seleksi Ujian Masuk Program Doktor (S.3) Tahun Akademik 2010-2015

No.	Tahun Akademik	Biaya			Trend (%)
		Peserta	@	Total	
1	2010/2011	37	400.000	14.800.000	
2	2011/2012	36	400.000	14.400.000	-3%
3	2012/2013	26	400.000	10.400.000	-28%
4	2013/2014	34	350.000	11.900.000	31%
5	2014/2015	15	350.000	5.250.000	-56%
6	2015/2016	28	350.000	9.800.000	87%

Sumber : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang

Pada tabel 5 terlihat bahwa *trend* jumlah calon mahasiswa berfluktuasi, mengalami penurunan sampai tahun ajaran 2012/2013, kemudian mengalami kenaikan sampai tahun ajaran 2014/2015, kemudian naik lagi pada tahun ajaran 2015/2016.

UIN Imam Bonjol Padang, sejauh ini juga sudah dapat mengatasi beberapa masalah dengan penerapan UKT pada mahasiswanya, seperti :

1. Ketika daya beli masyarakat turun, yang disebabkan naiknya harga barang kebutuhan pokok, UIN Imam Bonjol Padang menyediakan tarif terendah Uang Kuliah Tunggal (UKT), disamping juga memfasilitasi mahasiswa memperoleh beasiswa dari berbagai sumber.
2. Pemberlakuan tarif yang menimbulkan rasa iri dan perasaan tidak adil diantara mahasiswa, namun masalah ini bisa diatasi karena UIN Imam Bonjol Padang hanya menerapkan tiga bentuk jenis UKT dengan *rate* yang masih terjangkau dan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang UKT tersebut kepada mahasiswa.

Dalam sebuah lembaga modern pendanaan merupakan syarat mutlak terwujudnya kinerja yang memuaskan. Termasuk dalam hal ini seluruh kegiatan UIN Imam Bonjol Padang membutuhkan dukungan dana yang memadai. Aspek keuangan UIN Imam Bonjol Padang dapat diukur melalui realisasi penerimaan dan realisasi belanja.

Dalam melakukan perhitungan tarif yang berlaku sekarang, tim penyusun tarif menentukan tahap perhitungan *unit cost* yaitu dengan pendekatan akuntansi manajemen biaya. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menentukan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen biaya, baik biaya langsung (*direct cost*) maupun biaya tidak langsung (*indirect cost*) dan sekaligus menentukan komponen biaya tetap dan biaya variabel dari setiap jenis layanan.

Namun pada kenyataannya, perhitungan *unit cost* yang dilakukan untuk penetapan tarif tersebut belum memperhitungkan biaya tidak langsung yang terjadi akibat dari suatu aktivitas pelayanan akademik. Komponen biaya ini akan cukup mempengaruhi dalam besaran jumlah biaya yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan, selanjutnya juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan Satker BLU UIN Imam Bonjol Padang. Adanya perhitungan biaya yang tepat sebagai pertimbangan penetapan tarif pelayanan, dapat menjadi pemicu bagi peningkatan jumlah penerimaan. Sebagai Satker BLU, UIN Imam Bonjol Padang harus bisa mengoptimalkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Berdasarkan isu dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk menganalisa tariflayanan BLU yang sudah diberlakukan dengan menghitung kembali *unit cost* yang harus dikeluarkan untuk pelayanan BLU. Ketertarikan tersebut dikhususkan kepada salah satu unit dalam lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang cukup banyak menyerap anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari BLU, yaitu Pascasarjana. Pascasarjana adalah unit yang sangat mengandalkan dana BLU. Hal ini dikarenakan Pascasarjana tidak mendapatkan sumber dana dari dana rupiah murni.

Berdasarkan analisis yang berpedoman kepada Peraturan Menteri di atas, UIN Imam Bonjol Padang telah menerapkan pola tarif sebagai berikut untuk Pascasarjananya.

Tabel 6. Pola Tarif Program Pasca Sarjana yang Berlaku (dalam rupiah)

No.	Uraian	Nominal
1	Seleksi Ujian Masuk	
	a. Program Magister (S2)	250.000
	b. Program Doktor (S3)	350.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	
	a. Program Magister (S2)	4.000.000
	b. Program Doktor (S3)	6.000.000
3	Uang Pendidikan Lainnya	
	a. Biaya Ujian Tesis	1.800.000
	b. Biaya Ujian Disertasi Tertutup (Pendahuluan)	6.000.000
	c. Biaya Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)	10.000.000
	d. Ujian TOEFL/TOAFL Bagi Masyarakat Pendidikan (S2)	100.000
	e. Pelatihan TOEFL/TOAFL	300.000
4	Wisuda	
	a. Program Magister (S2)	450.000
	b. Program Doktor (S3)	450.000

Sumber : Dokumen Bagian Perencanaan UIN Imam Bonjol Padang

Dalam ilmu akuntansi biaya, perhitungan *unit cost* dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode *Activity Based Costing System (ABC system)*. Menurut Johnson (1991) *ABC system* merupakan suatu alternatif penentuan harga pokok produk atau jasa yang saat ini cukup dikenal dan sangat relevan. Hansen dan Mowen (2009) juga mengutarakan hal yang sama, bahwa metode *ABC system* adalah metode yang akurat dan memberikan informasi yang relevan yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan, berdasarkan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menghimbau perguruan tinggi untuk menghitung *unit cost* dengan menggunakan metode *ABC system*. Qayoumi (1996) menyatakan bahwa *ABC* diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi negeri sebagai lembaga publik. UIN Imam Bonjol Padang sebagai salah satu perguruan tinggi selayaknya juga menggunakan metode ini untuk mengevaluasi tarif layanannya kembali.

Dalam PERMENDIKBUD No. 93 Tahun 2014 *ABC system* digunakan dalam menghitung Standar Satuan Biaya Operasional dengan model pembiayaanya

itu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. UIN Imam Bonjol Padang pun belum sejalan dengan aturan ini. *ABC system* menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk dan jasa (Horngren, 2008). Jika dalam perhitungan *unit cost* UIN Imam Bonjol Padang memperhitungkan semua biaya-biaya tanpa terkecuali, maka kemungkinan besar tarif yang akan berlaku lebih besar dibandingkan dengan tarif sedang berlaku. Komponen biaya tidak langsung yang tidak terhitung antara lain adalah biaya listrik, biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung serta honor pegawai. Jika semua komponen biaya dihitung, penerimaan dapat dioptimalkan.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan adanya perubahan-perubahan internal maupun eksternal yang terjadi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang sudah dijabarkan di atas dengan judul “EVALUASI TARIF PELAYANAN BLU DENGAN METODE *UNIT COST* PADA UIN IMAM BONJOL PADANG”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapakah *unit cost* per *output* kegiatan layanan UIN Imam Bonjol Padang menggunakan perhitungan metode *Activity Based Costing* ?
2. Berapa perbandingan hasil *unit cost* dengan perhitungan metode *Activity Based Costing* untuk setiap tarif layanan BLU UIN Imam Bonjol Padang dengan tarif yang berlaku ?
3. Apakah tarif yang diterapkan masih relevan dengan keadaan perkembangan yang telah dialami UIN Imam Bonjol Padang ?

Penelitian ini membatasi permasalahan dengan memfokuskan perhitungan *unit cost* pada unit Pascasarjana saja. Pascasarjana adalah unit yang sangat mengandalkan dana BLU. Dengan kata lain dana BLU diserap banyak oleh unit Pascasarjana. Maka dari itu diperlukan optimalisasi penerimaan pada kegiatan-kegiatan di unit Pascasarjana. Selain itu, UIN Imam Bonjol yang sudah ditetapkan sebagai BLU seharusnya menerapkan UKT. Namun pada Pascasarjana belum

diterapkan UKT, sehingga setiap kegiatan mahasiswa (seperti ujian akhir) harus membayar lagi. Oleh karena itu perlu diperhitungkan *unit cost* yang tepat sebagai dasar pengenaan tarif bagi mahasiswa. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi *preliminary test* untuk kebijakan tarif UIN Imam Bonjol ke depan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menghitung *unit cost* per *output* kegiatan layanan pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang menggunakan metode *Activity Based Costing*.
- b. Membandingkan hasil perhitungan *unit cost* untuk setiap tarif layanan BLU UIN Imam Bonjol Padang yang sedang berlaku dengan perhitungan metode *Activity Based Costing*.
- c. Memberikan rekomendasi untuk evaluasi tarif yang relevan dengan kondisi UIN Imam Bonjol Padang sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Peneliti sangat berharap dengan melakukan penelitian tentang tarif pelayanan BLU ini akan meningkatkan pemahaman peneliti tentang perhitungan tarif pelayanan khususnya menggunakan perhitungan *unit cost*, sehingga ilmu yang peneliti dapat bisa berguna baik untuk instansi tempat peneliti bekerja maupun instansi lain yang membutuhkan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga sehingga dapat diterapkan tarif pelayanan yang relevan dengan perkembangan UIN Imam Bonjol Padang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan perhitungan tarif pelayanan dengan menggunakan perhitungan *unit cost* demi meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara.

d. Bagi Pembaca

Peneliti berharap dengan membaca penelitian ini, para pembaca seperti mahasiswa dapat mengembangkan penelitian ini dengan penelitian baru dan juga ide-ide baru. Selanjutnya, bagi pembaca yang berada dalam institusi pemerintah, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan di institusinya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisi landasan teoritis sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan analisis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini berisi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable yang diamati dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan mengenai temuan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

